

Senat UIN Jakarta Gelar Rapat Pleno XI



Pada tanggal 6 Februari 2017, Senat Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta menggelar Rapat Pleno ke XI di Ruang Diorama Auditorium Harun Nasution. Agenda utama Rapat ini adalah penyampaian Laporan Kegiatan Senat Universitas periode 2016-2017 dan Laporan Rektor perihal Kebijakan dan Informasi Perkembangan UIN 2015-2016 serta Rencana Kerja tahun mendatang.

Dalam sambutannya, Ketua Senat Universitas, Prof. Dr. Atho Mudzhar terlebih dahulu memberikan penjelasan perihal keanggotaan Senat yang baru (SK Rektor perihal perubahan anggota senat ke-12), di mana terdapat anggota (wajah lama) dari para Guru Besar dengan status dosen profesor purna waktu. Dalam laporannya, Ketua Senat menyampaikan bahwa saat ini senat memiliki 4 komisi yaitu Komisi Dikjar, Komisi Penelitian dan Pengabdian, Komisi Etik, dan Komisi Renstra dan Anggaran Akademik. Hingga saat ini, Senat Universitas telah mengajukan 23 draft SK rektor, 19 sudah menjadi SK Rektor dan 4 masih dalam proses menjadi SK. Dalam rencana kerja tahun 2017-2018, direncanakan senat berupaya menyelesaikan 19 draft SK Rektor baru yang sedang dan akan diselesaikan oleh komisi-komisi yang ada. Atas nama Senat Universitas, Prof. Atho menyampaikan apresiasinya kepada Rektor atas kerja samanya yang baik selama ini terutama dalam membuat Surat Keputusan (SK) Rektor perihal berbagai hal yang dihasilkan oleh Senat Universitas. Selain hal di atas, Ketua Senat juga menyampaikan laporan perihal pemberian pertimbangan/persetujuan kenaikan pangkat dosen ke Lektor Kepala dan ke Guru Besar.

Ketua Senat juga menginformasikan bahwa dalam kaitan dengan remunerasi dosen, melalui surat Nomor Un.01/SU/KP.07.1/97/2016 tanggal 1 Juni 2016, Senat Universitas pada dasarnya mendukung upaya Rektor memberlakukan sistem remunerasi untuk dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan beberapa catatan penting untuk diperhatikan. Namun setelah remunerasi

dosen diuji-cobakan pada September s/d Desember 2016, ternyata terdapat banyak keluhan dari para dosen. Oleh sebab itu, Senat Universitas kembali melakukan koordinasi dan rapat lanjutan pada tanggal 14 Februari 2017 dengan Rektor yang diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Tim untuk membahas masalah remunerasi dosen ini.

Berdasarkan hasil pertemuan dengan Wakil Rektor tersebut, Ketua Senat Prof. Dr. M. Atho Mudzhar melalui surat nomor Un.01/SU/KP.07.1/31/2017 tanggal 27 Februari 2017, memberikan beberapa saran terkait perbaikan sistem remunerasi dosen. Di antaranya yaitu *pertama*, terhitung mulai tahun anggaran 2017 remunerasi dosen dibayarkan 75% atau 100%, jika keadaan keuangan memungkinkan. *Kedua*, perlu perbaikan sistem verifikasi remunerasi dosen berbasis IT yang terpadu. Jikalau mungkin agar dilayani oleh satu unit khusus yang ditugaskan atau diberi tugas tambahan baik di tingkat Fakultas maupun Universitas. *Ketiga*, perlu dilakukan peningkatan sosialisasi remunerasi kepada dosen secara merata dan efektif, jika perlu dilakukan sistem pendampingan dengan melibatkan Fakultas termasuk menerbitkan buku Pedoman Remunerasi Dosen untuk semua dosen. *Keempat*, ketentuan tentang Satuan Kredit Point Remunerasi (SKPR) sebagaimana tertuang dalam SK Rektor Nomor 610 Tahun 2016 tentang Satuan Kredit Poin Remunerasi Dosen PNS dan Dosen Tetap Bukan PNS Badan Layanan Umum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta agar disempurnakan, termasuk dengan membuka kesempatan kepada Fakultas untuk mengajukan draft SKPR dengan persetujuan Senat Fakultas dan Senat Universitas. *Kelima*, perlu dikaji lebih lanjut tentang tambahan remunerasi untuk dosen atau Guru Besar yang mendapat tugas tambahan struktural atau tugas tambahan setara. Demikian beberapa saran yang diajukan Senat Universitas, agar remunerasi dosen dapat dilaksanakan dengan pengelolaan yang lebih baik. (SAA)

Wawancara Eksklusif Bersama Ketua Senat Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Prof. Dr. H. Yunan Yusuf

Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi hingga kini dikenal sebagai salah satu fakultas favorit di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang memiliki visi ingin menjadi menjadi fakultas terdepan (leading faculty) dalam pendidikan ilmu dakwah dan ilmu komunikasi dalam bingkai integrasi keilmuan, keislaman, dan keindonesiaan. Berita Senat Edisi ke-9 kali ini berkesempatan mewawancarai Ketua Senat Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi yaitu Prof. Dr. H. Yunan Yusuf perihal kiprah dan agenda Senat Fakultas selama tahun 2016-2017 ini. Berikut ini petikan hasil wawancara dengan Prof. Yunan tanggal 21 Februari 2017.

Mulai kapan bapak diangkat dan dilantik menjadi Ketua Senat?

Saya resmi dilantik menjadi Ketua Senat Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi tanggal 11 Februari 2015 lalu. Sekretaris Senat saat ini adalah Ismet Firdaus, M.Si.

Dimana lokasi Kantor Senat dan bagaimana kondisinya?

Sampai hari ini, Senat Fakultas masih menempati ruang Guru Besar dan belum memiliki kantor resmi yang permanen. Namun bagi kami, persoalan ruangan tidak menjadi masalah yang berarti.

Aktifitas apa saja yang sudah dilakukan Senat?

Hingga saat ini, Senat Fakultas bisa dibilang cukup produktif. Di antara beberapa tugas yang sudah dilakukan adalah *pertama*, member pertimbangan dan pengesahan

kurikulum fakultas dan prodi. *Kedua*, memberikan pertimbangan perihal penerimaan dosen baik dosen tetap, dosen tetap non PNS dan tidak tetap. *Ketiga*, memberikan pertimbangan dan dorongan kepada dekan agar mencapai target IKU yang telah ditentukan. *Keempat*, memberikan pertimbangan atas Rencana Biaya Anggaran (RBA) Fakultas untuk tahun 2017.



Bagaimana hubungan Senat dengan Dekan? Masukan apa yang diberikan untuk Dekan?

Kami memiliki hubungan yang baik dan sinergis dengan Dekan. Bila terdapat sesuatu hal yang membutuhkan pertimbangan senat, maka biasanya Senat akan cepat meresponsnya dengan mengadakan rapat. Di antara beberapa masukan yang diberikan kepada Dekan adalah pertama, mendorong dipatenkannya beberapa karya dosen sehingga memperoleh HAKI. Kedua, mendorong dosen agar lebih kreatif menulis baik di Jurnal Nasional maupun Internasional. Ketiga, mendorong percepatan terbitnya jurnal terakreditasi.

Harapan-harapan apa yang bapak Inginkan ke depan?

Saya berharap ke depan terdapat perhatian yang lebih besar lagi dari Universitas kepada Senat Fakultas sehingga Senat bisa lebih maksimal dalam menunaikan tugas-tugasnya. (SAA)

Profil Sekretaris Komisi Pendidikan, Pengajaran, Sumber Daya Manusia, dan Pengembangan Program Studi (Dikjar) Senat Universitas, dr. Femmy Nurul Akbar, Sp.PD

Femmy Nurul Akbar lahir di Jakarta, 5 Oktober 1973. Pendidikan formalnya dari SD hingga SMA di Jakarta, kemudian melanjutkan studi S-1 nya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) dan lulus tahun 1998.

Pada tahun 2000 ia mengikuti Nal Program Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Penyakit Dalam (IPD) mengikuti jejak ayahnya yang merupakan Guru Besar IPD FKUI dan lulus tahun 2006. Femmy sempat direkrut menjadi staf pengajar di Departemen IPD FKUI/RSCM, namun akhirnya memilih untuk mengabdikan diri menjadi dosen di Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang saat itu dipimpin oleh Prof. dr. M.K. Tadjudin selaku Dekan.

Pada tahun 2008, ia diangkat menjadi dosen tetap PNS dan tahun yang sama mengikuti Program Konsultan/ (Sp)-2 IPD bidang Penyakit Saluran Cerna dan Hati, yang kemudian memperoleh gelar Konsultan Gastroenterologi Endoskopi Hepatologi (KGEH) pada tahun 2009. Sejak tahun 2015 PSPD berubah namanya menjadi Program Studi Kedokteran dan Profesi Dokter (PSKPD) yang terdiri dari program studi S1 Kedokteran dan program Profesi Dokter. Pada Program Studi Profesi Dokter, mahasiswa melakukan proses pembelajaran klinik di RS Pendidikan dan Jejaring. Femmy terakhir dipercaya menjadi Koordinator Praktik

Klinik PSKPD yang mengatur kegiatan dan penempatan mahasiswa di RS Pendidikan, juga menjadi Wakil Badan Koordinasi Pendidikan RS Pendidikan Utama RSUP Fatmawati –UIN, serta sampai saat ini menjadi Kepala Bagian IPD UIN.



Dengan pengembangan Program Studi Kedokteran dan adanya amanah UU No. 20 tentang Pendidikan Kedokteran bahwa penyelenggara pendidikan dokter di Indonesia harus berbentuk Fakultas Kedokteran (FK), maka pada tahun 2015 Rektor UIN membentuk Tim Pembentukan FK UIN, dimana Femmy menjadi anggota tim. Di samping mengajar juga menjadi dokter spesialis paruh waktu di RS swasta di Jakarta Selatan. Selain itu juga juga masih menjadi pengurus Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Jakarta Raya (PAPDI JAYA) sebagai komisariat Jakarta Selatan, juga menjadi komisariat Jakarta Selatan dari Pengurus PPHI-PGI-PEGI. Bentuk kontribusi dalam organisasi di antaranya sebagai tim pembuat konsensus penyakit seperti Konsensus Pankreatitis Akut dan Hepatitis B Kronik di Indonesia. Tulisannya mengenai kesehatan ada di berbagai majalah, dan media lainnya. Sejumlah penelitian dan *review article* juga sudah dipublikasikan pada Jurnal Internasional dan Nasional. (SAA)